

PROSIDING

**SINERGITAS MAHKAMAH AGUNG
DAN KOMISI YUDISIAL DALAM MEWUJUDKAN
*EXCELLENT COURT***

PROSIDING

**SINERGITAS MAHKAMAH AGUNG
DAN KOMISI YUDISIAL DALAM MEWUJUDKAN
*EXCELLENT COURT***

6 Mei 2017 M/9 Sya'ban 1438 H
Aula A.K. Anshori
Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Editor:

Astika Nurul Hidayah, S.H., M.H.

Ika Ariani Kartini, S.H., LL.M.



Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)
PROSIDING: SINERGITAS MAHKAMAH AGUNG DAN KOMISI YUDISIAL
DALAM MEWUJUDKAN EXCELLENT COURT

Copyright © Astika Nurul Hidayah dan Ika Arini Kartini

Diterbitkan pertama kali oleh UM Purwokerto Press. Hak cipta dilindungi oleh undang-undang *All Rights Reserved* Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit

Cetakan Pertama: Juli 2017
x+190 hlm, 21.5 cm x 29.7 cm
ISBN: 978-602-6697- -

Reviewer : Dr. Indriati Amarini, S.H., M.Hum.
Susilo Wardani, S.H., S.E., M.Hum.
Editor : Astika Nurul Hidayah, SH., MH.
Ika Arini Kartini, SH., MH
Ilustrasi Sampul : Dhi Bramasta
Perancang Sampul : UMP Press
Penata Letak : Makhrus Ahmadi

Diterbitkan Oleh:
Penerbit



UM Purwokerto Press (Anggota APPTI)

Jalan Raya Dukuh Waluh, PO BOX 202, Purwokerto 53182
Tlp. (0281) 636751, 6304863; Ext. 474
Fax: (0281) 637239
E-mail : ump.press@gmail.com
website: www.lpip.ump.ac.id

Bekerjasama dengan:



PRAKATA

DEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO

Bismillaahirrahmaanirrahiim,

Alhamdulillah puji syukur kami haturkan kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat, hidayah, bimbingan Allah SWT maka pelaksanaan Seminar Nasional dan *Call for Papers* yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto dapat berjalan dengan baik. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada teladan terbaik sepanjang masa Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, shahabat dan ummatnya yang setia mengikuti ajarannya hingga akhir zaman.

Komisi Yudisial Republik Indonesia dibentuk pada tahun 2001 melalui Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 24B. Pembentukan Komisi Yudisial didasarkan pada semangat untuk meningkatkan kualitas peradilan di Indonesia di tengah keprihatinan banyak pihak mengenai suramnya wajah peradilan dan keadilan di Indonesia pada saat itu. Salah satu aspek yang menjadi pilar penegakan hukum di Indonesia adalah hakim. Sebagai aparatur negara yang merdeka, hakim harus dapat menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Untuk dapat mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan peradilan yang bersih serta berwibawa, maka dipandang perlu untuk melakukan penataan sistem peradilan yang terpadu dengan sistem pengawasan intern dan ekstern. Oleh karena itu, eksistensi Komisi Yudisial menjadi penting maknanya untuk ikut mewujudkan harapan akan peradilan yang bersih dan berwibawa tersebut. Akan tetapi, tidaklah mungkin akan dapat mewujudkan harapan tersebut apabila tidak ada sinergi positif antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial. Berangkat dari latar belakang tersebut maka Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto menyelenggarakan suatu kegiatan akademil berupa Seminar Nasional dan *Call for Papers* dengan mengangkat tema **SINERGITAS MAHKAMAH AGUNG DAN KOMISI YUDISIAL DALAM MEWUJUDKAN EXCELLENT COURT.**

Tema yang diambil adalah tema aktual yang sangat menarik untuk dikaji dari ilmu hukum sesuai dengan visi yang dimiliki oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto yaitu UNGGUL, MODERN, DAN ISLAMI, serta selaras dengan salah satu misi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto yaitu *menyelenggarakan penelitian untuk mengembangkan ilmu hukum yang relevan dengan kebutuhan pembangunan nasional dan penegakan hukum yang bertujuan bagi kesejahteraan umat manusia yang dilandasi*

nilai Islam. Makalah yang terdapat dalam prosiding ini menawarkan gagasan dan ide terkait penyelenggaraan peradilan yang bersih dan berwibawa di Indonesia sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif dalam memahami penyelenggaraan negara Indonesia dari perspektif ketatanegaraan.

Purwokerto, 30 Juni 2017
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Susilo Wardani, S.H., S.E., M.Hum.

DAFTAR ISI

ARTIKEL UTAMA

Tugas, Fungsi dan Kewenangan Mahkamah Agung Republik Indonesia SUNARTO <i>(Mahkamah Agung Republik Indonesia)</i>	1
Tugas, Fungsi dan Kewenangan Komisi Yudisial Republik Indonesia FARID WAJDI <i>(Komisi Yudisial Republik Indonesia)</i>	5
Format Idial Hubungan antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia MUHAMMAD FAUZAN <i>(Universitas Jenderal Soedirman)</i>	11
TOPIK : SINERGITAS MAHKAMAH AGUNG DAN KOMISI YUDISIAL DALAM MEWUJUDKAN EXCELLENT COURT <i>Ultra Petita</i> dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Pengadilan ROCHMANI <i>(Universitas Stikubank)</i>	17
Peran Komisi Yudian dalam Pengawasan Hakim di Indonesia EMY ROSNA WATI <i>(Universitas Muhammadiyah Sidoarjo)</i>	29
Penguatan Kewenangan Komisi Yudisial dalam Rangka Mewujudkan Peradilan yang Independen NITA ARIYANI <i>(Universitas Janabadra)</i>	41
Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 Tentang Pembatalan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Alam SOEDIRO <i>(Universitas Muhammadiyah Purwokerto)</i>	53
Peran Komisi Yudisial dalam Menegakkan Keluhuran Harkat dan Martabat Hakim MARSITININGSIH, ARDIANA HIDAYAH <i>(Universitas Palembang)</i>	61
Penyelesaian Sengketa Pencemaran Minyak oleh Kapal Tanker dan Relevansi Peran Mahkamah Agung dalam Prinsip <i>Polluter Pays Principle</i> dan <i>Strict Liability</i> . ELLY KRISTIANI PURWENDAH <i>(Universitas Wijayakusuma)</i>	67
<i>Quo Vadis</i> Mahkamah Agung dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 (Kajian	

Empiris Pertimbangan dan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta ABDUL QODIR JAELANI, RIEZ KIFLI KOLEWORA <i>(Universitas Gadjah Mada)</i>	83
Fungsi Pengawasan Komisi Yudisial: Independensi Hakim Bukan Sebagai Hak Melainkan Kewajiban AHMAD <i>(Universitas Muhammadiyah Tangerang)</i>	99
Implementasi Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 terhadap Pembatalan Peraturan Daerah Tahun 2016 di Era Otonomi Daerah TRI SUHENDRA ARBANI, RESTI DIAN LUTHVIATI <i>(Universitas Gadjah Mada)</i>	111
Peran Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) dalam Pengelolaan Perbatasan Darat antara Indonesia dan Papua Nugini DEWA GEDE SUDIKA MANGKU <i>(Universitas Pendidikan Ganesha)</i>	129
Perlindungan Hukum terhadap Hak Isteri Akibat Cerai Talak Adanya Pasal 70 Ayat (6) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama SURYATI <i>(Universitas Wijayakusma)</i>	141
Mewujudkan Hakim Karir yang Berkualitas dan Berintegritas. INDRIATI AMARINI <i>(Universitas Wijayakusma)</i>	153
CAHYONO <i>(Universitas Sebelas Maret Surakarta)</i>	153
Harmonisasi dan Sinkronisasi Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Berdasarkan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 ABDUL AZIZ NASIHUDDIN <i>(Universitas Jenderal Soedirman)</i>	163
Hakim dalam Telaah Sistem Hukum dan Konsep Profetik BAYU SETIAWAN <i>(Universitas Muhammadiyah Purwokerto)</i>	175